



EVALUASI KINERJA BAPPEDA-LITBANG KABUPATEN KAUR DALAM PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN

Rahiman Dani^{1*)}; Sislan²⁾; Henny Aprianty²⁾; Hernowo Noviyanto²⁾

¹⁾ *Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu*

²⁾ *Department of Public Administration, Fisipol, Universitas Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Bengkulu*

*Email Korespondensi: danirahiman@gmail.com

How to Cite :

R. Dani; Sislan; H. Aprianty; Noviyanto, H. (2023). Evaluasi Kinerja Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur Dalam Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan. SENGKUNI Journal – Social Sciences and Humanities, 4(2) . DOI: <https://doi.org/10.37638/sengkuni.4.2.259>–266

ARTICLE HISTORY

Received [07 June 2023]

Revised [25 June 2023]

Accepted [27 July 2023]

Published [31 December 2023]

KEYWORDS

Quality, Service, Public, dimensions

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengetahui dan memahami hasil evaluasi dari Kinerja BAPPEDA-LITBANG Kabupaten Kaur dalam penyusunan rencana pembangunan sangat baik. Metode Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. , tanpa melakukan perlakuan atau manipulasi pada variabel yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi yang ada dengan cara mengumpulkan data secara objektif. Sedangkan Untuk menghimpun informasi dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan. Triangulasi dengan 6 informan pada kantor BAPPEDA LITBANG di Kabupaten Kaur. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan teori dan praktik. Analisis difokuskan pada variabel-variabel yang berkaitan tentang evaluasi kinerja BAPPEDA-LITBANG di kabupaten Kaur dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan, adapun Dari hasil riset yang sudah Jika dilakukan oleh ahli peneliti, maka kesimpulannya dalam studi ini ialah. evaluasi kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Kaur dalam proses penyusunan rencana kerja pembangunan sudah efektif dan efisien.

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe, know and understand the results of the evaluation of the performance of BAPPEDA-LITBANG of Kaur Regency in preparing very good development plans. Methods This research will be conducted using a qualitative research approach. , without carrying out any treatment or manipulation of the variables being studied. Qualitative descriptive research is a type of research that aims to describe existing conditions by collecting data objectively. Meanwhile, to gather information in this study, the methods used are observation, interviews, and documentation. Triangulation with 6 informants at the BAPPEDA LITBANG office in Kaur District. Data analysis was carried out by comparing theory and practice. The analysis focused on variables related to evaluating the performance of BAPPEDA-LITBANG in Kaur district in the process of preparing a

development work plan. From the results of research that has been carried out by expert researchers, the conclusions in this study are. evaluation of the performance of the Research and Development Agency of Kabupaten Kaur in the process of preparing the development work plan has been effective and efficient.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan lokal dikenal dengan istilah Otonomi daerah merujuk pada kebebasan untuk mengatur tata kelola pemerintahan yang ada di suatu wilayah. berbasis lokal berdasarkan aspirasi masyarakat. Konsep desentralisasi pada dasarnya menguraikan memiliki hak untuk mengontrol dan mengelola masalah mereka sendiri serta memberikan pelayanan kesejahteraan kepada warga yang membutuhkan terkait. Peran pemerintah daerah adalah memperkuat masyarakat dengan baik agar dapat merencanakan, membangun, dan mengelola sendiri untuk mempercepat pembangunan di daerah mereka.

Untuk melaksanakan pembangunan daerah yang terencana dan terkoordinasi, dibentuklah lembaga perencanaan pembangunan daerah yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di antara para pelaku pembangunan. Pembangunan yang terencana dan terkoordinasi dapat terlaksana dengan baik apabila lembaga-lembaga di daerah dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. Oleh karena itu, peran BAPPEDA sebagai koordinator menjadi sangat penting. Secara operasional, RKPD memuat petunjuk untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan di bidang pelayanan dan penguatan pembangunan masyarakat dan daerah, yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala SKPD dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan RKP.

Di sisi lain, sebenarnya menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja pemerintah provinsi dalam melaksanakan Rencana dan kegiatan untuk meningkatkan aksioma. Menurut (Lorita, 2016) Penyusunan RCAP didasarkan Dalam hal arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, prosedur penyusunan dan revisi, pemantauan dan evaluasi, serta kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan, semuanya harus saling terkait dan terintegrasi agar tercapai tujuan pembangunan yang optimal dan efisien anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014, BAPPEDA harus melaksanakan RKPD Sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku guna mencapai pembangunan yang efektif dan efisien..

Penilaian terhadap program dan kegiatan Renja SKPD meliputi evaluasi terhadap Penilaian prestasi, kumpulan objektif, area, dan estimasi biaya. Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian DPA-SKPD yang sebenarnya untuk menentukan pencapaian sasaran kinerja, penggunaan dana, dan rintangan yang dihadapi. Maksudnya adalah untuk memverifikasi bahwa Tujuan pencapaian kinerja program dan tindakan Renja SKPD harus terpenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip dan misi Renstra SKPD, dan prioritas serta tujuan pembangunan tahunan wilayah. Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD dijalankan tiap tiga bulan selama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi hasil Renja SKPD meliputi terhadap program dan kegiatan Penggunaan indikator kinerja yang telah ditentukan sebelumnya untuk kelompok sasaran tertentu di area yang telah ditentukan sebelumnya diukur. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah program dan kegiatan tersebut telah mencapai tolak ukur yang telah ditentukan (Purnawan, 2021). dengan mengevaluasi pelaksanaan Untuk mengetahui sejauh mana tujuan indikator kinerja tercapai, penggunaan dana, dan

keterbatasan dan memastikan bahwa program dan langkah-langkah SKPD - rencana kerja sesuai dengan visi dan Asesmen terhadap misi dan prioritas dan sasaran pembangunan tahunan Renstra SKPD, serta pelaksanaan Renja SKPD dilakukan setiap tiga bulan selama tahun anggaran berjalan

Pertumbuhan adalah proses perubahan, partisipasi, dan kemajuan. Proses perubahan mengacu pada fakta bahwa pertumbuhan masyarakat adalah kegiatan pendidikan yang bertujuan Untuk menggerakkan warga Menurut (Devi Deswimar, 2014), program-program pembangunan masyarakat akan sukses secara maksimal apabila fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di semua bidang, terutama dalam meningkatkan aspek sosial dan ekonomi.

Menurut (Nurbiyati, 2017) menjelaskan perkembangan tersebut merujuk pada serangkaian upaya yang bertujuan untuk mendorong Perkembangan Perubahan dan evolusi yang terstruktur dan disengaja oleh suatu negara dan pemerintah untuk mencapai kemajuan dan pembangunan bangsa. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah Upaya membawa perubahan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat di daerah tertentu.

Pertumbuhan adalah proses untuk mencapai tujuan nasional. Banyak faktor yang saling terkait yang terlibat dalam pertumbuhan ini. Pertumbuhan tidak dapat terjadi secara spontan, tetapi melalui proses yang disebut perencanaan pembangunan, di mana pemerintah memainkan peran kunci. Perencanaan pembangunan merupakan upaya untuk mengalokasikan sumber daya Pembangunan yang terbatas dilakukan mencapai tujuan sosial ekonomi yang diinginkan secara efektif dan efisien (Listyaningsih, 2017)

Menurut , kinerja diartikan sebagai "catatan hasil yang dihasilkan dari fungsi pekerjaan atau aktivitas yang ditentukan selama periode waktu tertentu". Oleh karena itu, kinerja dapat dihasilkan oleh tugas Tugas khusus atau produk dari kegiatan yang dilakukan selama jangka waktu yang ditentukan.

Menurut (HASIBUAN, 2014) yang dikutip oleh Sujak dan Sutiadi (2003:6), kinerja merujuk pada hasil kerja individu dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan padanya, yang didasarkan pada kemampuan, pengalaman, dedikasi, dan waktu yang tersedia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja mencakup pencapaian individu sementara tugas dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pembangunan Ini adalah proses untuk mencapai tujuan pemerintah. Banyak faktor yang terlibat dalam perkembangan ini saling terkait. Pembangunan tidak dapat dilakukan sendirian, tetapi melalui suatu proses yang dikenal sebagai perencanaan pembangunan., tetapi peran terbesar pemerintah adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman untuk mencapai tujuan perbaikan kondisi sosial ekonomi Secara optimal dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang ada terbatas (Listyaningsih, 2017)

Menurut (Purnawan, 2014) Perencanaan merupakan mata rantai tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan pengelolaan negara. Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan melebihi sumber daya yang tersedia. Dengan rencana ini, kami ingin membentuk sumber daya pembangunan yang berbeda yang dapat menghasilkan hasil yang optimal secara Cakap dan berhasil dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. dan mengembangkan potensi pembangunan.

Tersebut mencakup berbagai aspek, seperti infrastruktur, sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan sektor ekonomi. dapat dibagi menjadi perencanaan nasional, sektoral dan regional. Tergantung pada tingkat administratifnya, Rencana pembangunan bisa berupa rencana pusat atau daerah. Dalam aspek waktu, Rencana

pengembangan terdiri dari rencana jangka panjang, menengah, dan singkat. Dalam hal proses dan mekanisme, desain bisa turun atau naik atau kombinasi keduanya.

Dilakukan sebagai tahap persiapan sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal digunakan untuk mempercepat dan meningkatkan proses pembangunan yang terstruktur dan efektif di Indonesia. tahun 2004 pada dasarnya memiliki lima tujuan dan fungsi utama.

Maksud dan tujuan utama 1) Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan didukung. 2) Menjamin terjadinya keselarasan, kecocokan, dan sinergi antara wilayah, waktu, dan tugas antara pemerintah pusat dan daerah. 3) Memastikan keselarasan dan konsistensi antara rencana, anggaran, organisasi pelaksana dan pemantauan. 4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 5) Memastikan penggunaan sumber daya yang efisien, efektif dan adil.

Renja PD merupakan dokumen perencanaan untuk perangkat daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan aturan Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dokumen ini harus mempertimbangkan RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui oleh pimpinan daerah. Selain itu, Renja PD juga harus memperhatikan arah kebijakan nasional dan daerah serta prioritas pembangunan nasional dan daerah. Proses penyusunan, pengendalian, dan evaluasi Renja PD juga harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku Penilaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Prosedur perubahan pembangunan daerah jangka panjang. Rencana perencanaan dan pengembangan Jangka Panjang Daerah Yang Sesuai Rencana dan Rencana Pembangunan Bagian 7 (tujuh) tata kerja pemerintahan daerah dalam kaitannya dengan perangkat daerah Tata cara penyusunan rencana kerja, proses penyusunan rencana kerja Perangkat daerah terdiri dari 6 (enam) jahitan, yaitu:

1. Menyusun rencana operasional perangkat daerah,
2. Sintesis draft pertama rencana kerja daerah,
3. Menyusun rencana kerja daerah,
4. Pembentukan forum perangkat daerah/kerjasama perangkat daerah,
5. Menyiapkan rancangan akhir perangkat daerah,
6. Membuat rencana kerja daerah.

Alue connoisseur menyiapkan proyek awal renja badan daerah untuk review badan daerah, hasil evaluasi tahun lalu hasil rencana kerja badan daerah dan hasil evaluasi kinerja instansi daerah. Sistem regional untuk tahun berjalan. Pasal 7(2) Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tiap-tiap instansi pemerintah daerah harus menjalankan penyusunan Renja-Unit organisasi yang disusun sesuai dengan Renstra SKPD dan terkait dengan RKPD serta Kebijakan, Program, dan Pembangunan. Kegiatan tersebut dijalankan secara langsung oleh pemerintah daerah atau mendorong partisipasi masyarakat.

Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah Setiap tahun, Bappeda-Litbang Kabupaten Kaur menyusun Renja yang didasarkan pada rencana strategis Litbang Bappeda dan Kaur tahun sebelumnya serta menyebutkan RKPD Kabupaten Kaur tahun berjalan. Rencana operasional Bappeda dan Litbang tahun ini adalah perencanaan RPJMD Kabupaten Kaur tahun sebelumnya yang berisi prioritas pembangunan daerah dan dijabarkan melalui program-program pembangunan, agar sejalan dengan RPJMD, Renstra-SKPD, dan Renja SKPD, sehingga mempermudah evaluasi kinerja. Sesuai dengan Peraturan Menteri , evaluasi hasil dari pelaksanaan RKPD.

Menurut (Azhar, 2015), keberhasilan RKPD dapat dilihat dari tahapan perencanaan, eksekusi, pengawasan, dan penilaian. Penelitian tersebut menyatakan bahwa BAPPEDA harus menyusun strategi perencanaan yang efektif, mengimplementasikan RKPD sesuai rencana, memantau pelaksanaan yang sedang berlangsung, dan mengevaluasi hasilnya. melakukan tinjauan pengembangan dilakukan dengan memeriksa kerentanan yang tersisa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2010). Penelitian ini bermaksud menyajikan data secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan fenomena yang ada di lapangan (Creswell, 2013). Studi ini berasal dari penelitian yang bersifat kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2013) Tipe penelitian kualitatif ini menggambarkan situasi sebagaimana adanya tanpa melakukan manipulasi atau mengubah variabel yang sedang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang detail dan komprehensif mengenai fenomena yang diamati. Untuk mengumpulkan data, teknik yang digunakan adalah wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan triangulasi. (Arikunto Suharsimi, 2010).

Teknik analisis data menurut Creswell dalam (Purnawan et al., 2022) dilakukan melalui beberapa tahap dengan langkah, diantaranya: Pengumpulan Data, Reduksi data, Penyajian Data, Penarikan Kesimpulan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dimulai dari data yang sudah ada atau terkumpul kemudian melakukan pemilihan, penyederhanaan, menggolongkan data dan membuang data yang tidak perlu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan data apa saja yang mau diambil (Amiruddin & Asikin, 2008). Setelah itu dilakukan penyajian data dengan cara penyusunan sekumpulan data atau informasi agar lebih mudah dipahami (Creswell, 2014). Selanjutnya menghubungkan dan membandingkan antara teori yang ada dengan hasil praktek di lapangan kemudian mencari hubungan antara satu komponen yang lain sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti pada Kantor Lurah di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemudian dilakukan Pengumpulan informasi dari beragam sumber dan wawancara tatap muka dengan pihak Badan Litbang Kabupaten Kaur untuk melihat bagaimana evaluasi Penyusunan rencana pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan dalam menjalankan kinerjanya. dan juga dalam pengumpulan informasi terkait dokumen dan rekaman wawancara

Agar dapat memahami bagaimana penilaian prestasi Bappeda Litbang di Kabupaten Kaur dalam proses perencanaan pembangunan, faktor-faktor tersebut mengacu pada konsep George Edward III yang dikemukakan oleh Bernardin dan Russel. Konsep tersebut memuat enam kinerja utama yang dapat dipakai sebagai ukuran prestasi, yaitu:

a. Quality

Kualitas Telah berjalan dengan mulus dan sejalan dengan rencana awal yang telah ditetapkan dipersiapkan sebelumnya. Semua pihak yang terlibat telah terlibat dengan baik. Tujuan pekerjaan hampir mencapai harapan dan hasil dari kegiatan juga tidak terlalu berbeda dari yang diinginkan pada awalnya seperti perencanaan yang telah disusun sebelumnya.

b. Quantity

Dalam hal jumlah, Bappeda – Litbang telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan pelaksanaan perencanaan juga berjalan sesuai dengan

rencana yang telah disusun. Hampir 90% kegiatan setiap tahun telah dilakukan oleh Bappeda – Litbang untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas di Kabupaten Kaur.

c. Timeliness

Dalam hal kecukupan waktu, sudah terpenuhi dengan baik. Faktanya terlihat dari kemampuan para pekerja di Bappeda -Litbang Kabupaten Kaur dalam mengatur waktu pelaksanaan kegiatan dengan efektif, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian kegiatan.

d. Cost Effectiveness

Bappeda-Litbang telah memanfaatkan sumber daya organisasi (personel, teknologi, dan bahan) secara optimal Untuk mencapai hasil optimal atau meminimalkan kerugian dari setiap unit. penggunaan sumber daya. Pemanfaatan sumber daya organisasi (personel, dana, teknologi, bahan baku) ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan hasil masing-masing unit dalam penggunaan sumber daya.

e. Need for Supervision

Ini mencerminkan Seberapa jauh karyawan dapat menyelesaikan tugasnya tanpa memerlukan pengawasan langsung dari atasan untuk mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Seorang karyawan yang mencapai tingkat ini menunjukkan Komitmen Kerja yang kuat. Ini adalah tingkat di mana karyawan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perusahaan dan merasa bertanggung jawab terhadap pekerjaannya.

f. Interpersonal Impact

Ini mencerminkan seberapa besar karyawan mempertahankan martabat, reputasi, dan kerja tim dengan kolega dan bawahan. Oleh karena itu, secara individu, Bappeda-Litbang telah berkolaborasi dengan semua rekan kerja.

Proses penilaian kemajuan pembangunan daerah di Kabupaten Kaur oleh Bappeda merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 mengenai Metode Penyusunan Skema, Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari program pembangunan daerah yang telah dilaksanakan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional tergantung pada peran serta strategi Pekerjaan pembangunan dilakukan secara serempak oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah tugas dan wewenangnya. Karena skala dan ruang lingkup pembangunan nasional yang besar, diperlukan kerja sama, penyatuan, dan koordinasi antara para pengambil kebijakan.

Penilaian pembangunan daerah adalah Kegiatan evaluasi yang mengevaluasi pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang tertentu dan menganalisis masalah dan faktor keberhasilan pelaksanaan pembangunan. sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan kebijakan pembangunan daerah di masa depan.

Bappeda - Litbang Kaur menggunakan tiga aspek untuk menilai keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kaur. Pertama, Jumlah anggaran yang tersedia untuk pengembangan wilayah. Kedua, anggaran yang digunakan dalam pengembangan wilayah. Ketiga, seberapa berhasil pengembangan wilayah tersebut dengan anggaran yang tersedia dan digunakan. Evaluasi pengembangan wilayah Kabupaten Kaur Tindakan Kegiatan yang dilakukan oleh Bappeda dilaporkan kepada gubernur untuk diawasi pengembangan masa depan yang lebih efektif dan efisien.

Penilaian keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Kaur didasarkan pada Regulasi Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 mengenai Penyusunan Rencana, Pengawasan Pelaksanaan, dan Evaluasi Pembangunan Wilayah. Penilaian ini dilakukan dengan memperhatikan jumlah dana yang diperuntukkan bagi

pembangunan daerah, anggaran yang telah disediakan, harus dipantau secara ketat oleh pemerintah daerah. Hal ini penting agar dana yang digunakan dapat dialokasikan secara Berkualitas dan produktif, serta mampu menghasilkan hasil yang terbaik dalam pembangunan daerah rencana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penilaian pembangunan daerah di Kabupaten Kaur berjalan dengan efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian para ahli, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: penilaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Kaur dalam proses perencanaan pembangunan telah terbukti berhasil dan produktif. Ini didasarkan pada efisiensi yang terjadi di Kabupaten Kaur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menerapkan metode perencanaan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, yang melibatkan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur. Pelaksanaannya diatur dengan memantau hasil yang sesuai dengan visi dan misi perencanaan serta tujuan perencanaan. Pada saat yang sama, RDA adalah pengembangan yang lebih sukses dan produktif di Kabupaten Kaur di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto Suharsimi. (2010). *Prosedur penelitian: suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipt.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3, 63–70.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (Edisi Ketiga)*. Pustaka Pelajar.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed)*. Pustaka Pelajar.
- Devi Deswimar, A. (2014). Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.657>
- HASIBUAN. (2014). *MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA*. BUMI AKSARA.
- Listyaningsih. (2017). *Administrasi pembangunan: pendekatan konsep dan implementasi* (Vol. 8, Issue 73).
- Lorita, E. (2016). Implementasi Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi. *Profesional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 2(2). <https://doi.org/10.37676/professional.v2i2.170>
- Nurbiyati, T. (2017). Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Manusia: Sebuah Review. *Kajian Bisnis STIE Widyawidya Wiyaha*, 23(1), 52–63. <https://doi.org/10.32477/jkb.v23i1.203>
- Purnawan, H. (2014). TRANSFORMASI PT. JAMSOSTEK (PERSERO) MENJADI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KETENAGAKERJAAN DI KANTOR CABANG DARMO SURABAYA (Studi Pada Implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial). *Publika*, 2(3). <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/view/8372>
- Purnawan, H. (2021). *Implementation of Central Government Policy on Priority for the*

Use of Village Funds in Makartitama and Ulak Mas Villages , Lahat Regency , Indonesia. 06(1), 1–9.

Purnawan, H., Triyanto, D., & Thareq, S. I. (2022). Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Taba Air Pauh Kabupaten Kepahiang. *Perspektif*, 11(2). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.5876>

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*.